

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dokumen Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan penjabaran program/ kegiatan tahunan yang diturunkan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022-2026.

Penyusunan Dokumen Renja-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan dan penganggaran untuk tahun 2023.

Dengan telah disusunnya Dokumen Renja ini, diharapkan dapat membuat arah pembangunan khususnya dibidang Kepegawaian menjadi lebih terarah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah.

Oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan dari semua pihak terhadap penyusunan Rencana Kerja ini, Semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kedamin, 23 Juli 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
2.1. Landasan Hukum	2
3.1. Maksud Dan Tujuan	3
4.1. Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2023).....	5
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023	5
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	110
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	1Error! Bookmark not defined.
BAB V	299
PENUTUP	299

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.....	66
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi/Nasional. Tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat di atasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun RENJA-OPD Tahun Anggaran 2023 yang akan dijadikan salah satu acuan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 serta merupakan dasar penyusunan RKA – OPD/RAPBD Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang dikompilasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD.

RENJA-OPD disusun mengacu dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah bermaterikan rencana kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Kapuas Hulu dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).

Penyusunan RENJA tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berlaku sejak 1 Januari 2023 dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2023. Rancangan Anggaran OPD yang sekaligus menyajikan pula berbagai potret permasalahan yang dihadapi, program prioritas pembangunan, rencana kegiatan kerja dan pendanaannya serta arah kebijakan keuangan OPD.

Secara garis besar, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 sekaligus berfungsi secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, baik bagi segenap Aparatur Pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan, pembangunan dalam periode satu tahun kedepan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

2.1. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kapuas Hulu 2016-2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

3.1. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2023, yang dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan RENJA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan program Bupati dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dimana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sudah tergambar dalam rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

4.1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 2.1. Landasan Hukum
 - 3.1. Maksud Dan Tujuan
 - 4.1 Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2023)
 - 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2023
 - 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2023)

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023

Rencana kerja merupakan rencana tahunan dari rencana strategis, adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Evaluasi pelaksanaan Renja s/d Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Rencana Kerja (Renja) BKPSDM dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (Output)	Target	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			2023	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman/tepat waktu	100 %	55,95%	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman/tepat waktu	100 %	73,61%	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	61,67%	
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	50,00%	
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	75,00%	
2.	Program Kepegawaian Daerah				
	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku • Persentase Pemutahiran data kepegawaian 	100 %	15,50% 72,68%	
	2. Mutasi dan Promosi ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Mutasi Pindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan • Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu • Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan 	100 %	65,00% 44,00% 61,00%	
	3. Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100 %	28,57%	
	4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin • Persentase Penilaian Kinerja ASN 	100 %	83,33% 96,59%	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100 %	77,00%	
	2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	66,67%	

		Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
--	--	--	--	--	--

A. Indikator Kinerja

a. Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku.

b. Permasalahan

- Adanya perubahan jadwal dalam proses penerimaan PPPK Formasi Tahun 2022.
- Adanya PNS yang baru mengantarkan usul Pensiun mendekati TMT Pensiun.
- Masih pada proses penyusunan formasi.

c. Solusi

Berkoordinasi dengan Bagian Personil atau Bagian Aparatur OPD untuk mengingatkan PNS yang mendekati waktu pensiun untuk mengusulkan berkas pensiunnya.

B. Indikator Kinerja

a. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Displin

b. Permasalahan

Laporan Pelanggaran Disiplin baru disampaikan ke BKPDM pada akhir bulan Maret

c. Solusi

Proses diselesaikan di TW II

C. Indikator Kinerja

a. Persentase Penilaian Kinerja ASN

b. Permasalahan

Masih banyaknya ASN yang belum mengantarkan SKP

c. Solusi

Membuat Surat Pemberitahuan ke seluruh OPD tentang Perkembangan Capaian Pengumpulan SKP

D. Indikator Kinerja

a. Persentase Pemutahiran data kepegawaian

b. Permasalahan

Belum aktifnya SIMPEG Online

c. Solusi

Memulai persiapan pengaktifan SIMPEG Online dengan Pihak Ketiga

E. Indikator Kinerja

a. Jumlah SK Tugas Belajar yang terfasilitasi

b. Permasalahan

- Usulan Tugas Belajar PNS masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan.
- Belum tersediannya Peta Kebutuhan Pendidikan berdasarkan ANJAB dan ABK dari masing-masing OPD
- Belum selarasnya Peraturan yang mengatur tentang Pendidikan Formal PNS
- Terdapat intervensi Politis sehingga fasilitasi SK Tugas Belajar tidak berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku

c. Solusi

- Melakukan sosialisasi/bimtek tentang Tugas Belajar ASN
- Melakukan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Bagian Organisasi yang mempunyai kewenangan Penyusunan ANJAB ABK Pemerintah Daerah
- Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
- Memberikan telaahan kepada Pimpinan serta kepada PNS yang mengajukan Tugas Belajar.

F. Indikator Kinerja

a. Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

b. Permasalahan

- Belum tersedianya Anggaran pada Triwulan 1 dan 2 yang menyebabkan kegiatan belum terlaksana.
- kurangnya akses informasi terhadap PNS yang bertugas didaerah pelosok sehingga terlambat dalam mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

- Kurangnya Kontrol dari masing-masing OPD terhadap PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal, sehingga usulan yang diajukan hanya dari PNS yang mengusulkan.

c. Solusi

Memberikan informasi dari berbagai media informasi seperti media social

G. Indikator Kinerja

- a. Jumlah SK Laporan Peningkatan Pendidikan/Pencantuman Gelar PNS yang terselesaikan.

b. Permasalahan

- Kurangnya Kontrol dari masing-masing OPD terhadap PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal, sehingga usulan yang diajukan hanya berdampak kepada PNS yang peka terhadap Pendidikannya.
- kurangnya kesadaran/informasi kepada PNS yang telah selesai melaksanakan Pendidikan Formal untuk melaporkan hasil studi
- Adanya Mutasi Pemindehan terhadap PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sehingga antara Pendidikan yang dilaporkan dengan Jabatan yang diduduki menjadi tidak relevan

c. Solusi

- Melakukan koordinasi terhadap OPD untuk dapat melakukan kontrol terhadap PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal
- melakukan Pendataan ulang terhadap PNS yang belum melaporkan hasil studi Pendidikan Formalnya

H. Indikator Kinerja

- a. Persentase Mutasi Pemindehan ASN yang sesuai dengan ketentuan

b. Permasalahan

- Usulan Mutasi PNS masih ada yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan kompetensinya.
- PNS tidak memahami ABK dan Anjab sebagai salah satu persyaratan mutasi pindah.
- Mutasi PNS mengabaikan surat pernyataan 5 dan 10 tahun.

c. Solusi

Melakukan sosialisasi/bimtek tentang mutasi pemindahan ASN

I. Indikator Kinerja

- a. PNS tidak memahami ABK dan Anjab sebagai salah satu persyaratan mutasi pindah.

b. Permasalahan

- Kurangnya SDM di kecamatan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan structural.
- Pelantikan para Pejabat di Lingkungan Inspektorat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan proses pengusulan ke Instansi di luar Kabupaten Kapuas Hulu
- Ada beberapa PNS yang tidak hadir pada saat diundang untuk dilantik dan diambil sumpah jabatannya

c. Solusi

- Memberi masukan kepada Pimpinan untuk melakukan pemerataan SDM ke kecamatan-kecamatan.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Instansi terkait dan juga dengan para PNS yang diusulkan untuk menduduki Jabatan di dua OPD tersebut.
- Memberi sanksi yang dapat membuat efek jera kepada para PNS tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan belum sesuai dengan Standar Kompetensi;
2. Belum optimalnya upaya penegakan kode etik dan disiplin PNS;
3. Belum optimalnya pengendalian pengembangan kompetensi PNS melalui Diklat dan pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan;
4. Belum optimalnya pemahaman PNS terhadap pergeseran paradigma PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang DP3 menuju PP Nomor 46 tahun 2011 tentang SKP berbasis kinerja.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 10.794.997.616					Rp 10.794.997.616
5 3	KEPEGAWAIAN			Rp 8.519.280.216					Rp 8.519.280.216
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai RB • Predikat Sakip 	30,00 BB	Rp 5.382.643.466,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai RB • Predikat Sakip 	30,00 BB	Rp 5.382.643.466,00
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman/te pat waktu	100	Rp 41.121.650,00		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah dan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman/te pat waktu	100	Rp 41.121.650,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp 5.714.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp 5.714.400,00
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.009.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.009.800,00
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.022.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.022.900,00
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.465.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.465.500,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.310.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 3.310.000,00
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 5.663.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 5.663.500,00
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 16.935.550,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 16.935.550,00
5	03	01	2.01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	Rp 3.897.096.900,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	Rp 3.897.096.900,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

		yang dilaksanakan tepat waktu					yang dilaksanakan tepat waktu		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	Rp 3.643.845.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	Rp 3.643.845.800,00
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 249.309.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 249.309.200,00
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 2.175.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 2.175.900,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.766.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.766.000,00
5 03 012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Rp 850.853.016,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Rp 850.853.016,00
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 13.729.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 13.729.000,00
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	Rp 12.547.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	Rp 12.547.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 61.478.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 61.478.900,00
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 15.960.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 15.960.000,00
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 621.275.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 621.275.000,00
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 8.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 8.400.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp 117.463.116,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp 117.463.116,00
5 03 012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Rp 541.305.900,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Rp 541.305.900,00
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 2.880.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 2.880.000,00
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 135.799.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 135.799.500,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 402.626.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 402.626.400,00
5 03 012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 52.266.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 52.266.000,00
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 38.676.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 38.676.000,00
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Rp 13.590.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Rp 13.590.000,00
5 03 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	• Persentase ASN yang memenuhi	48%	Rp 3.136.636.750,00		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	• Persentase ASN yang memenuhi	48%	Rp 3.136.636.750,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

		<ul style="list-style-type: none"> kualifikasi pendidikan • Persentase disiplin ASN • Persentase Kapasitas Kinerja ASN • Indeks Kepuasan Masyarakat 	100%				<ul style="list-style-type: none"> kualifikasi pendidikan • Persentase disiplin ASN • Persentase Kapasitas Kinerja ASN • Indeks Kepuasan Masyarakat 	100%	
5 03 022.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku • Persentase Pemutakhiran data kepegawaian 	100%	Rp 1.506.895.600,00		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku • Persentase Pemutakhiran data kepegawaian 	100%	Rp 1.506.895.600,00
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Keg. Baru)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Rp 78.612.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Rp 78.612.200,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN /Jumlah calon ASN yang diterima	4 Laporan	Rp 1.004.207.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN /Jumlah calon ASN yang diterima	4 Laporan	Rp 1.004.207.400,00
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Usulan Pemberhentian yang terfasilitasi	362 Dokumen	Rp 128.216.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Usulan Pemberhentian yang terfasilitasi	362 Dokumen	Rp 128.216.000,00
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang	12 Dokumen	Rp 216.060.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang	12 Dokumen	Rp 216.060.000,00
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data yang di Mutahirkan	12 Dokumen	Rp 79.800.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data yang di Mutahirkan	12 Dokumen	Rp 79.800.000,00
5 03 022.02	Mutasi dan Promosi ASN	• Persentase Mutasi Pindahan ASN yang sesuai	100%	Rp 1.149.747.000,00		Mutasi dan Promosi ASN	• Persentase Mutasi Pindahan ASN yang sesuai	100%	Rp 1.149.747.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

		<ul style="list-style-type: none"> dengan ketentuan • Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu • Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan 	100%				<ul style="list-style-type: none"> dengan ketentuan • Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu • Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan 	100%		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi Pindahan ASN sesuai ketentuan yang dilaksanakan	100 Dokumen	Rp 124.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi Pindahan ASN sesuai ketentuan yang dilaksanakan	100 Dokumen	Rp 124.000.000,00	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	331 Dokumen	Rp 150.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	331 Dokumen	Rp 150.000.000,00	

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengembangan Karier dan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan	97 Dokumen	Rp 875.747.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengembangan Karier dan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan	97 Dokumen	Rp 875.747.000,00
5 03 022.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	42 Dokumen	Rp 136.653.500,00		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	42 Dokumen	Rp 136.653.500,00
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SK Tugas Belajar yang terfasilitasi Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Laporan Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar PNS yang terselesaikan 	20 Orang 80 Orang 70 Orang	Rp 136.653.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SK Tugas Belajar yang terfasilitasi Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Laporan Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar PNS yang terselesaikan 	20 Orang 80 Orang 70 Orang	Rp 136.653.500,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 022.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Persentase Penilaian Kinerja ASN 	100%	Rp 343.340.650,00		Pengembangan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Persentase Penilaian Kinerja ASN 	100%	Rp 343.340.650,00
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Pendampingan Penyusunan SKP Tahunan/Bulanan	33 Laporan	Rp 180.284.250,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Pendampingan Penyusunan SKP Tahunan/Bulanan	33 Laporan	Rp 180.284.250,00
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Hasil Verifikasi	33 Laporan	Rp 15.942.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Hasil Verifikasi	33 Laporan	Rp 15.942.000,00
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase Pengelolaan Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	33 Orang	Rp 38.826.000,00		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase Pengelolaan Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	33 Orang	Rp 38.826.000,00
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	33 Orang	Rp 45.471.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	33 Orang	Rp 45.471.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	33 Laporan	Rp. 60.890.400,00		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	33 Laporan	Rp. 60.890.400,00
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33 Laporan	Rp 1.927.000,00		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33 Laporan	Rp 1.927.000,00
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp 2.275.717.400,00					Rp2.275.717.400,00
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target	25%	Rp 2.275.717.400,00		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target	25%	Rp 2.275.717.400,00
5 04 022.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100%	Rp 38.797.000,00		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100%	Rp 38.797.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	13 Orang	Rp 36.927.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	13 Orang	Rp 36.927.000,00
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengorganisasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	Rp. 1.870.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pembinaan, Pengorganisasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	Rp. 1.870.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 04 022.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target	100%	Rp 2.236.920.400,00		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target	100%	Rp 2.236.920.400,00
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	Rp 2.218.774.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	Rp 2.218.774.400,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2023

5 04 02 2.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	1 Dokumen	Rp. 18.146.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	1 Dokumen	Rp. 18.146.000,00	
TOTAL				Rp. 10.794.997.616		TOTAL				Rp. 10.794.997.616

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rencana Kerja Perubahan yang dituangkan dalam wujud dokumen/buku Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran penuh, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2023.

Adapun Dokumen Renja-OPD Tahun 2023 ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2023 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya, serta menjelaskan pula perihal kerangka ekonomi pembangunan OPD. Dalam dokumen Rencana Kerja ini juga menguraikan seluruh program kegiatan pembangunan Tahun 2023 dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk perkiraan pagu indikatif yang akan ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja APBD-P) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang Kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi/organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengelolaan manajemen Kepegawaian terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya.

Kedamin, 23 Juli 2023

